KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 12 Oktober 2018

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 20)	Jumat, 12 Oktober 2018	Terowongan Tol Cisumdawu Rampung Bulan Ini	Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pembangunan terowongan kembar atau twin tunnel sepanjang 472 meter, yang merupakan bagian dari jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan seksi 2 Fase 2 akan selesai bulan ini.
2	Media Indonesia (Halaman, 10)	Jumat, 12 Oktober 2018	Fasilitas Publik Beroperasi Penuh	Gerak cepat pemulihan prasarana publik dari dampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulteng diapresiasi berbagai pihak.
3	Media Indonesia (Halaman, 13)	Jumat, 12 Oktober 2018	Priwisata Kunci Perkuat Ekonomi	Jumlah wisatawan ditargetkan terus bertambah, yaitu 20 juta orang pada 2020 dan 25 juta pada 2025, yang diharapkan dapat menambah penerimaan devisa negara.
4	Media Indonesia (Halaman, 14)	Jumat, 12 Oktober 2018	Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2 Triliun untuk Bangun Tol	Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa.
5	Kompas (Halaman, 17)	Jumat, 12 Oktober 2018	Membangun Jaring Jabodetabek	Meski baru 5,8 kilometer, pengoperasian Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) memiliki arti penting. Sesuai dengan namanya, jalan tol ini diharapkan memperlancar arus kendaraan antara Jakarta dan Depok.
6	Kompas (Halaman, 18)	Jumat, 12 Oktober 2018	Rp 202, 5 Triliun untuk Infrastruktur	Indonesia mengantongi investasi hingga Rp 202,5 triliun untuk pengembangan infrastruktur di sejumlah wilayah.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 5)	Jumat, 12 Oktober 2018	RI Kembangkan Infrastruktur Hijau	Pemerintah menyatakan pembangunan infrastruktur hijau (*green infrastructure)* sangat penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs)
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 12 Oktober 2018	Pemenuhan Pembuayaan Segera Tuntas	PT Jakarta Tollroad Development menargetkan pemenuhan pembiayaan atau *financial close* proyek enam ruas tol dalam Kota Jakarta tahap pertama dapat ditandatangani paling lambat pada akhir Oktober 2018.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 12 Oktober 2018	Lelang Tunggu Kesepakatan Soal Tarif	Proses pelelangan badan usaha pelaksana Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I dengan perkiraan investasi Rp 1,67 triliun masih harus menunggu kesepakatan perusahaan daerah air minum mengenai komponen penunjang tarif.
10	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 12 Oktober 2018	Kontrak 2 Bendungan Belum Bisa Diteken	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa penandatanganan kontrak dua bendungan mundur dari jadwal karena evaluasi dari kelompok kerja belum selesai
11	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Jumat, 12 Oktober 2018	5 Pemodal Siap Biayai Proyek Infrastruktur	Lima perusahaan asal China, Hong Kong, Belanda, dan Malaysia berkomitmen membiayai sejumlah proyek Infrastruktur di Indonesia.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)	Jumat, 12 Oktober 2018	Menuju Pemulihan Tanah Kaili	John Ario Katili ahli geologi pertama di Indonesia, lebih dari 30 tahun silam telah memperingatkan akan adanya gempa besar berikut fenomena geologi di Kota Palu.
13	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)	Jumat, 12 Oktober 2018	Fokus Harus Diarahkan ke Tanah Papua	Destinasi wisata di Provinsi Papua dan Papua Barat berpotensi menyumbang 25% terhadap total kunjungan wisatawan secara nasional per tahun, apabila pemerintah serius dalam membangun infrastruktur penunjang.
14	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Jumat, 12 Oktober 2018	Minat Ada, Pembelian Minim	Pertumbuhan properti di Indonesia masih mengalami progres yang merangkak. Demikian pula dengan lahan kawasan industri yang masih stagnan.

Judul	**Terowongan Tol Cisumdawu Rampung Bulan Ini**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 20)		
Resume	Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pembangunan terowongan kembar atau twin tunnel sepanjang 472 meter, yang merupakan bagian dari jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan seksi 2 Fase 2 akan selesai bulan ini.		

Terowongan Tol Cisumdawu Rampung Bulan Ini

Akan jadi terowongan terpanjang di Indonesia.

Fery Firmansyah
fery_f@tempo.co.id

BANDUNG — Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pembangunan terowongan kembar atau *twin tunnel* sepanjang 472 meter, yang merupakan bagian dari jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi 2 Fase 2, akan selesai bulan ini. Terowongan itu berada di kawasan Rancakalong, Sumedang.

Menurut Iwa, bagian terowongan sebelah kiri sudah tembus sepanjang 472 meter. Sedangkan *tunnel* sebelah kanan baru tembus 392 meter. "Dan kami rencanakan November ini selesai," kata dia di kantornya kemarin.

ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI

Suasana pembangunan proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 4 Oktober lalu

Hingga saat ini, pengerjaan terowongan kembar tersebut sudah mencapai 80 persen. Iwa mengatakan terowongan kembar ini digadang-gadang sebagai terowongan terpanjang di Indonesia. Tiap terowongan memiliki dua lajur kendaraan.

"Setiap hari dilakukan pengeboran sekitar 4-5 meter. Setelah itu, konstruksi baja dan beton masuk," ujarnya.

Adapun pengerjaan konstruksi tol Cisumdawu Seksi 2 Fase 2 baru mencapai 51,14 persen dari panjang keseluruhan 10,7 kilometer. Sebagian lahan, menurut Iwa, masih belum dibebaskan. "Pembebasan lahan sudah 88,47 persen," katanya.

Pemerintah Jawa Barat dan kontraktor sudah menyelesaikan jalan tol Cisumdawu Seksi 2 Fase 1 sepanjang 6,35 kilometer. Iwa mengatakan konstruksi jalan tol Cisumdawu Seksi 2 untuk Fase 1 dan Fase 2 dengan panjang keseluruhan 17,05 kilometer dari Rancakalong menuju Sumedang akan tersambung pada Maret 2019. "Dengan syarat seluruh lahan sudah bebas. Masih perlu relokasi sekolah, aset desa, dan lahan sengketa," ucapnya.

Pemerintah menargetkan tol Cisumdawu bisa dimanfaatkan untuk jalur mudik Idul Fitri 2019. Ruas jalan tol ini bisa menjadi jalur alternatif menuju Sumedang dan kawasan Pantai Utara Jawa Barat. Secara paralel, pengerjaan jalan tol Cisumdawu Seksi 1 sepanjang 12,05 kilometer dari *interchange* Cileunyi menuju Rancakalong sudah dimulai. Iwa mengatakan proses pembebasan lahan untuk proyek ini sedang berjalan dan mencapai 60 persen. "Kami berharap pembayaran bisa diselesaikan bulan depan," ucapnya. Ruas tol Cileunyi-Rancakalong sepanjang 12,05 kilometer itu ditargetkan beroperasi pada September 2020.

Jalan tol Cisumdawu Seksi 1 dan Seksi 2 digarap oleh pemerintah dengan pendanaan salah satunya berasal dari pinjaman pemerintah Cina. Adapun proyek tol Cisumdawu Seksi 3-6 digarap oleh PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) sepanjang 32,8 kilometer. Target penyelesaiannya pada 2020.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jalan tol Cisumdawu merupakan akses yang paling ideal menuju Bandar Udara Kertajati, Majalengka. "Tapi sampai hari ini belum tersambung. Rute yang paling siap lewat tol Cikopo-Palimanan," tuturnya, Selasa lalu. Ridwan mengatakan tol Cisumdawu ditargetkan tuntas pada 2020.

● AHMAD FIKRI (BANDUNG)

Judul	**Fasilitas Publik Beroperasi Penuh**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Gerak cepat pemulihan prasarana publik dari dampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulteng diapresiasi berbagai pihak.		

Gerak cepat pemulihan prasarana publik dari dampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulteng diapresiasi berbagai pihak.

Fasilitas Publik Beroperasi Penuh

Putri Anisa Yuliani
putrianisa@mediaindonesia.com

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memuji respons cepat pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah dan Lombok. Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat bertemu Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Bali, kemarin. Pada kesempatan itu, Guterres juga menyampaikan dukacita mendalam bagi para korban bencana alam di Sulteng dan Lombok.

"Sekjen PBB mengatakan masyarakat Indonesia memiliki resiliensi yang tinggi dan mengapresiasi respons cepat pemerintah sehingga situasi dapat diatasi dalam waktu yang singkat," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. "Beliau mengatakan selalu tidak mudah kita bekerja pada saat situasi *emergency* seperti itu," imbuhnya.

Sebelumnya, rangkaian gempa mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Gempa bermagnitudo 7,4 yang tertinggi memicu tsunami dan likuefaksi. Akibatnya, 2.045 korban meninggal dunia, 671 orang hilang, dan 10.679 jiwa luka berat.

Selain itu, sebanyak 67.310 rumah, 2.736 sekolah rusak, 20 fasilitas kesehatan, dan 12 titik jalan rusak berat. Sebanyak 82.775 warga mengungsi ke sejumlah titik di Palu, Donggala, dan Sigi. Hingga 14 hari pascagempa dan tsunami, proses pencarian dan evakuasi korban dihentikan mulai kemarin, Kamis (11/10). Meski demikian, pemerintah terus berupaya membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya sarana pendidikan.

Sementara itu, Pemprov Sulteng kemarin menyiapkan lima lokasi alternatif untuk merelokasi warga di tiga wilayah yang terdampak paling parah bencana alam itu.

Lima Lokasi itu ialah Kecamatan Palu Barat (79,3 hektare), dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru (200 dan 217 hektare), serta dua lokasi di Kecamatan Palu Timur (57 hektare dan 99,63 hektare). Diduga ada 5.000 unit rumah yang terkubur akibat likuefaksi di Perumahan Balaroa dan Kelurahan Petobo.

ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPADANG

PETAKAN STRUKTUR TANAH: Peneliti Pusat Studi Gempa Bumi Nasional meneliti struktur lapisan tanah dan batuan di Balarowa, Palu, Sulawesi Tengah, kemarin. Penelitian tersebut untuk mengetahui penyebab likuifikasi dan memastikan lokasi tersebut layak huni.

Fasum beroperasi

Kementerian ESDM memastikan penanganan listrik dan pasokan BBM di Sulteng saat ini berjalan baik. Hingga 10 Oktober 2018, pukul 24.00, sebanyak 30 stasiun pengisian bahan bakar umum telah beroperasi.

"Laporan Posko ESDM Siaga Bencana menginformasikan bahwa hingga Rabu, 30 SPBU sudah beroperasi, rinciannya 15 di Kota Palu, 7 di Donggala, 1 di Sigi, dan 7 di Parimo," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, kemarin.

Penyediaan air bersih melalui sumur bor juga sudah selesai di posko-posko pengungsian, seperti di Kantor ESDM Sulteng dengan kedalaman 11 meter (m), Kantor Gubernur Sulteng 2 titik dengan kedalaman masing-masing 30 m, Rumah Sakit Lapangan Bunderan Biromaru, Sigi, dan Masjid Agung dengan kedalaman 30 m.

Kerja keras pemerintah memulihkan dampak bencana di Sulteng juga diapresiasi anggota DPR Rendy Lamadjido. Dia mengapresiasi segenap jajaran Kementerian Perhubungan yang dinilai tanggap dan cekatan serta mampu memulihkan Bandara Palu dalam kurun waktu dua hari pascabencana. (Cah/OL/YH/N-1)

Judul	**Priwisata Kunci Perkuat Ekonomi**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Jumlah wisatawan ditargetkan terus bertambah, yaitu 20 juta orang pada 2020 dan 25 juta pada 2025, yang diharapkan dapat menambah penerimaan devisa negara.		

Pariwisata Kunci Perkuat Ekonomi

Jumlah wisatawan ditargetkan terus bertambah, yaitu 20 juta orang pada 2020 dan 25 juta pada 2025, yang diharapkan dapat menambah penerimaan devisa negara.

Fetry Wuryasti
Fetry@mediaindonesia.com

ANTARA FOTO/AMAN IMF-WBG/ZABUR KARURU

PENCAPAIAN INDONESIA: Sejumlah delegasi mengunjungi pameran di Pavilion Indonesia di area penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, kemarin. Pameran tersebut menampilkan pencapaian Indonesia mulai ekonomi, industri, infrastruktur, hingga pariswisata.

DEPUTI Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, mengatakan peningkatan ekspor dan pariwisata merupakan sebagian kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Hal tersebut dia sampaikan dalam seminar Reinventing Bretton Woods Committee yang mengambil tema *The Shadow of Neo Protectionism and Coping with The Challenges of the Normalisation Process*, di Nusa Dua, Bali, kemarin. Acara itu dilaksanakan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018. Seminar membahas mengenai bagaimana negara-negara menghadapi bayang-bayang neoproteksionisme dan proses normalisasi kebijakan negara maju.

Mirza menyatakan proses normalisasi perekonomian negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), memang membawa dampak global, khususnya terhadap negara berkembang, bahkan sejak dicanangkan pada Mei 2013. Demikian pula neoproteksionisme yang dimulai pada 2016 dan semakin menninggkat pada 2018. "Kebijakan-kebijakan ekonomi AS dan Tiongkok khususnya, membawa pengaruh kepada negara berkembang, termasuk dari sisi nilai tukar," ujarnya.

Dalam kondisi global tersebut, kata Mirza, Indonesia sebagai negara yang memiliki defisit transaksi berjalan terus menjaga agar defisit tersebut berada pada level yang aman. Oleh karena itu, semakin penting bagi Indonesia untuk mendorong ekspor dan pariwisata. Berbagai destinasi wisata pun terus dikembangkan, agar wisatawan asing memiliki pilihan destinasi selain Bali. Jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia ditargetkan terus bertambah, yaitu 20 juta orang pada 2020 dan 25 juta pada 2025, yang diharapkan dapat menambah penerimaan devisa negara.

Danau Toba

Terkait dengan hal tersebut, kemarin, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan bersama tujuh investor bisnis industri pariwisata menandatangani perjanjian kerja sama investasi untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba dengan komitmen investasi mencapai sekitar Rp6,1 triliun atau sekitar US$400 juta dengan lahan pengembangan seluas 77,5 hektare.

Penandatanganan perjanjian investasi diselenggarakan dalam rangkaian acara menjelang IMF – Word Bank Group Annual Meeting dalam Forum Pembangunan Berkelanjutan Tri Hita Karana ke-2 di Bali. Penandatanganan kerja sama investasi dilakukan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo, bersama dengan tujuh investor, disaksikan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPODT, Luhut Binsar Panjaitan, serta para menteri terkait.

Sebagai pengelola kawasan, BPODT memastikan para investor untuk melakukan pengembangan dengan pendekatan *eco-tourism*, yaitu pengembangan yang menjaga kelestarian lingkungan, pengembangan yang melibatkan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba, serta pengembangan dengan menjaga kearifan lokal dan tradisi warisan budaya setempat. "Kerja sama yang terjalin ini tidak hanya mengenai solusi investasi saja. Kami bersama-sama dengan para investor akan memastikan bahwa proses pengembangan berjalan sesuai dengan pendekatan *eco-tourism* yang menjaga keharmonisan alam, manusia, dan aspek spiritual," ujar Arie. (Uud/E-2)

Judul	**Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2 Triliun untuk Bangun Tol**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 14)		
Resume	Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa.		

Mandiri Kucurkan Kredit Rp2 Triliun untuk Bangun Tol

Kredit sindikasi kepada Hutama Karya Rp2,041 triliun itu diperuntukkan pembangunan ruas tol di Sumatra.

Raja Suhud
suhud@mediaindonesia.com

BANK Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa.

Untuk itu, perseroan menyalurkan kredit investasi berskema sindikasi kepada Hutama Karya dengan limit Rp2,041 triliun untuk pembangunan ruas tol Terbanggi Besar, Lampung Tengah-Kayu Agung, Sumatra Selatan, sepanjang 185 km.

Nilai itu meliputi 22% dari total kredit sindikasi dari lembaga keuangan dalam negeri sebesar Rp9,17 triliun. Selain kredit sindikasi, Hutama Karya juga mendapatkan fasilitas CDS Rp5,2 triliun untuk memastikan keberlangsungan proyek itu.

Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan SEVP Large Corporate Banking Bank Mandiri Dikdik Yustandi, Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar, serta Dirut PT Hutama Karya Bintang Perbowo, di Bali, kemarin.

Menurut Royke, keikutsertaan Bank Mandiri dalam sindikasi mengindikasikan konsistensi perseroan dalam mendukung sinergi BUMN pada program strategis pemerintah.

"Bank Mandiri memiliki komitmen kuat dalam pembangunan proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan tol, bandara, dan pelabuhan laut. Untuk itu, kami memiliki produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan termasuk pada tahap pembebasan lahan, pembangunan konstruksi dan pengoperasian," katanya.

Produk investasi

Pada kesempatan itu, Bank Mandiri bersama perusahaan anak Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi serta PT Jasa Marga (persero) Tbk menerbitkan kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur (KIK-Dinfra).

Kemarin, produk investasi yang pertama kali diluncurkan itu telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan segera diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana Rp1,5 triliun.

Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas sebelumnya membantu Jasa Marga menerbitkan obligasi rupiah di pasar modal internasional, *komodo bonds* senilai Rp4 triliun pada 2017.

"Harapannya, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal ini dapat dimanfaatkan perusahaan bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan efektif dengan biaya terukur."

Bank Mandiri juga memberikan fasilitas kredit transaksi khusus Rp2,5 triliun kepada PT Indonesia Infrastruktur Finance dengan tenor 3 tahun.

Untuk keseluruhan sektor infrastruktur, Bank Mandiri mengucurkan pembiayaan Rp165,8 triliun hingga Juni 2018. Dari nilai itu, Rp39,3 triliun dialokasikan untuk pembangunan transportasi, termasuk bandara dan pelabuhan, Rp36,8 triliun untuk pembangkit listrik, Rp24,1 triliun untuk proyek migas dan energi terbarukan, Rp18,3 triliun untuk tol dan konstruksi serta sisanya untuk pembangunan telematika, perumahan, dan fasilitas kota serta sektor lainnya. (E-3)

Judul	**Membangun Jaring Jabodetabek**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 17)		
Resume	Meski baru 5,8 kilometer, pengoperasian Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) memiliki arti penting. Sesuai dengan namanya, jalan tol ini diharapkan memperlancar arus kendaraan antara Jakarta dan Depok.		

Membangun Jaring Jabodetabek

Meski baru 5,8 kilometer, pengoperasian Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) memiliki arti penting. Sesuai dengan namanya, jalan tol ini diharapkan memperlancar arus kendaraan antara Jakarta dan Depok. Jalan tol ini jadi alternatif dari jalur konvensional antara Jalan Lenteng Agung dan Margonda. Tol Desari juga terhubung dengan jaringan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).

Jalan Tol Desari kelak tidak hanya berakhir di Bojong Gede. Pemerintah telah meminta badan usaha jalan tol, PT Citra Waspphutowa, melanjutkan pembangunan sampai ke Sela Benda, Kabupaten Bogor, sehingga panjangnya bertambah dari 21,6 kilometer menjadi 28 km. Jalan tol ini juga direncanakan tersambung dengan ruas Jalan Tol Bogor Ring Road.

Ke depan, Jalan Tol Desari juga akan tersambung dengan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi. Dengan demikian, Jalan Tol Desari akan sejajar dengan ruas Jalan Tol Jagorawi sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat, baik ke arah Bogor maupun Jakarta.

Prinsipnya, jalan tol merupakan jalur alternatif dan baru dibangun setelah jalur utama terbangun. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki pilihan untuk melalui jalan lain, tidak harus lewat jalan tol. Dari sisi fungsi, jalan tol pada dasarnya dibangun untuk memperlancar arus logistik dan pengguna jarak jauh.

Di wilayah Jabodetabek, jalan tol telah menjadi urat nadi mobilisasi arus barang maupun orang. Banyak jalan tol sudah sangat padat. Rata-rata jumlah total perjalanan di Jabodetabek pada 2015 sebanyak 47,5 juta pergerakan per sehari. Jumlah itu mencakup pergerakan di dalam Jakarta, keluar Jakarta, ataupun ke dalam Jakarta.

Sementara dalam sehari rata-rata terdapat 4,4 juta transaksi di seluruh jalan tol Indonesia. Dari jumlah itu, 80 persen atau sekitar 3,52 juta transaksi ada di Jalan Tol Jabodetabek. Contohnya, ruas Jalan Tol JORR yang awalnya di pinggiran Jakarta, kini seakan sudah di tengah kota dengan pusat perkantoran yang berkembang di kanan kirinya.

Agar fungsinya lebih optimal, jalan tol mesti saling tersambung menjadi sebuah jaringan. Di Jabodetabek, JORR yang dibangun bertahap telah membentuk sebuah "cincin" yang melingkari Jakarta dari timur sampai ke barat. Jaringan itu kemudian tersambung dengan ruas-ruas yang mengarah ke barat atau timur, semisal Jalan Tol Becakayu atau Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Demikian pula Jalan Tol Desari yang akan tersambung dengan JORR II yang kini sedang dibangun. JORR itu akan menjadi "cincin" jalan tol berikutnya. Sebenarnya, JORR II sudah lama direncanakan pembangunannya. Namun, pembebasan lahan menjadi kendala. Sebagai gambaran, ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran telah tanda tangan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) pada 2009, ruas Kunciran-Serpong pada 2008, dan ruas Serpong-Cinere pada 2011.

Meski demikian, jalan tol tetap jadi alternatif dari jalur utama. Untuk perkotaan seperti Jabodetabek, pergerakan orang mesti pertama-tama dilayani angkutan transportasi massal, bukan jalan tol. Bahkan, melalui kebijakan integrasi sistem transaksi, pemerintah menggarisbawahi bahwa jalan tol pertama-tama diperuntukkan memperlancar arus logistik.

Oleh karena itu, tarif kendaraan golongan II-V justru turun signifikan. Pengguna jalan tol yang biasa menempuh jarak pendek seakan disarankan memakai jalur non-tol atau memanfaatkan angkutan umum. (NOBERTUS ARYA DWIANGGA)

Judul	**Rp 202, 5 Triliun untuk Infrastruktur**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Indonesia mengantongi investasi hingga Rp 202,5 triliun untuk pengembangan infrastruktur di sejumlah wilayah.		

Rp 202,5 Triliun untuk Infrastruktur

NUSA DUA, KOMPAS — Indonesia mengantongi investasi hingga Rp 202,5 triliun untuk pengembangan infrastruktur di sejumlah wilayah. Kesepakatan ini menjadi solusi sumber pendanaan alternatif di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Dana itu disalurkan kepada 14 perusahaan BUMN.

Kesepakatan tersebut disahkan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

Acara penandatanganan kesepakatan dihadiri direksi 14 BUMN serta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarmo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Rini Sumarno memaparkan, sekitar 80 persen dari total nilai investasi itu merupakan kerja sama berbentuk kemitraan strategis antara BUMN dan investor. Adapun 20 persen lainnya terbagi menjadi investasi melalui pasar modal dan pembiayaan proyek.

Dengan mayoritas skema investasi berbentuk kemitraan strategis, Rini berharap BUMN mendapat keahlian dari sektor swasta untuk membangun infrastruktur dengan kualitas internasional. "Total ada 19 transaksi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur," kata Rini.

Kemarin, Indonesia juga menandatangani kerja sama lindung nilai nilai tukar mata uang berbasis syariah. Lindung nilai syariah ini pertama kalinya diterapkan di Indonesia.

Dari 21 proyek infrastruktur yang akan dikerjakan BUMN dengan swasta, kerja sama terbesar datang dari sektor migas, yakni PT Pertamina (Persero) dengan CPC Corporation, Taiwan, dengan investasi 6,5 miliar dollar AS atau Rp 97,5 triliun.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama dengan CPC Corporation dilakukan dalam proyek pembangunan pabrik *nafta crackers* yang menciptakan subtitusi impor cukup besar. CPC membangun produk turunan yang bisa memenuhi kebutuhan propilena, polietilena, dan butadiena di Indonesia, sebagai bahan baku industri. Proyek ini akan dimulai pada 2026. "Dampak penting dari proyek ini, negara bisa menghemat devisa dalam jangka panjang," kata Nicke.

Situasi berbeda dialami PT Angkasa Pura II (Persero) yang hingga kini belum menetapkan investor sebagai mitra strategis. Ada 15 perusahaan swasta yang telah menawarkan kemitraan.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, pihaknya masih dalam proses penetapan investor sebagai mitra strategis untuk perluasan Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Nilai investasinya diperkirakan 500 juta dollar AS atau Rp 7,5 triliun. (DIM)

Judul	**RI Kembangkan Infrastruktur Hijau**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 5)		
Resume	Pemerintah menyatakan pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) sangat penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs)		

RI Kembangkan Infrastruktur Hijau

NUSA DUA — Pemerintah menyatakan pembangunan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) sangat penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Oleh karena itu, pemerintah akan mengintervensi agar *green financing* dan *green infrastructure* dapat berkembang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hanya dengan infrastruktur hijau atau ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

"Kita bicara SDGs semakin relevan karena keberlanjutan program ini tidak gratis tapi perlu pembenahan agar progres didapatkan untuk masa depan lebih baik. Makanya infrastruktur hijau diperlukan, karena masih ada *gap* infrastruktur, ini bukan kemewahan atau hobi tapi untuk kesejahteraan semua," tuturnya, Kamis (11/10).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia—Jepang dengan membahas pentingnya membangun infrastruktur hijau dalam rangkaian agenda Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, Bali.

Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur perlu lebih dipasarkan dengan imbal hasil yang bersaing serta risiko minimal agar dapat memikat para investor swasta lanjutnya.

Menkeu menyayangkan, saat ini pasar potensial untuk proyek *green investments* masih sangat kecil dan kurang beragam.

Infrastruktur hijau juga membutuhkan investasi di depan, dan baru memberikan hasil dalam jangka panjang, kemudian juga kerap berisiko terkait ketidakpastian regulasi, ekonomi, dan perkembangan teknologi.

Infrastruktur hijau merupakan proyek infrastruktur yang pada tahap perencanaan dan pembangunannya memperhatikan aspek dan konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan.

"Pemerintah harus melakukan intervensi agar *green financing* dan *green infrastructure* dapat terus berkembang. Kita perlu mengoreksi pasar bebas yang cenderung tidak memperhitungkan dampak proyek yang tidak ramah lingkungan," tegas Menkeu.

Menkeu menambahkan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur senilai US$400 miliar pada kurun 2015—2019.

Khusus untuk anggaran 2019, pemerintah telah mengalokasikan US$26,67 miliar untuk infrastruktur, lebih besar dari alokasi anggaran 2018.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, serta menurunkan kesenjangan antardaerah.

"Saya percaya, bahwa tidak ada satu model *green financing* yang berhasil untuk semua negara. Kebijakan dan pilihan investasi harus sesuai dengan masing-masing kondisi negara, dalam suatu strategi yang komprehensif. Dalam hal ini saya menyambut pembiayaan inovatif yang akan membuka kesempatan bagi *green infrastructure*, yang tentunya akan membawa banyak manfaat ke depan," katanya.

Menkeu juga memaparkan bahwa JBIC telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dan selama ini melakukan bantuan teknis dalam bidang pembiayaan infrastruktur.

JBIC telah berkontribusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia untuk mendukung konstruksi pembangkit energi, rel kereta, dan jalan tol. ***(Rinaldi M. Azka)***

Judul	**Pemenuhan Pembuayaan Segera Tuntas**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT Jakarta Tollroad Development menargetkan pemenuhan pembiayaan atau financial close proyek enam ruas tol dalam Kota Jakarta tahap pertama dapat ditandatangani paling lambat pada akhir Oktober 2018.		

Pemenuhan Pembiayaan Segera Tuntas

JAKARTA — PT Jakarta Tollroad Development menargetkan pemenuhan pembiayaan atau *financial close* proyek enam ruas tol dalam Kota Jakarta tahap pertama dapat ditandatangani paling lambat pada akhir Oktober 2018.

Rivki Maulana & Irene Agustine
redaksi@bisnis.com

Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Frans Satyaki Sunito mengatakan bahwa pemenuhan pembiayaan rencananya melibatkan banyak bank dalam bentuk pinjaman sindikasi.

Rencana perjanjian kredit baru akan dilakukan untuk pembangunan tahap pertama sepanjang 31,20 kilometer atau pada ruas awal, yakni Semanan—Sunter dan Sunter—Pulogebang.

"Kami targetkan [pemenuhan pembiayaan] akhir Oktober [2018] sudah bisa. Secara prinsip, perbankan sudah *oke* tinggal membenahi administrasinya saja," kata Frans kepada *Bisnis*, Kamis (11/10).

Menurutnya, perkiraan investasi untuk pembangunan tahap pertama mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah itu, kebutuhan pinjaman kredit untuk membangun proyek mencapai 70% atau sekitar Rp14 triliun, sisanya Rp6 triliun dipenuhi dari ekuitas.

Dana ekuitas sendiri sebagian sudah dikucurkan untuk pembebasan lahan dan konstruksi awal pembangunan proyek. Saat ini, progres pembebasan lahan tahap pertama sudah lebih 75%.

"Memang belum beres semua. Namun, sebagian besar lahan sudah tersedia. Dan di lapangan untuk konstruksi sendiri bisa dibilang cukup lancar," ujarnya.

Saat ini, Frans menjelaskan bahwa progres konstruksi tahap pertama mencapai 25% dengan fokus pembangunan lebih dahulu dilakukan untuk seksi A yang berada di sebelah timur, yakni Pulogebang—Kelapa Gading sepanjang 9,30 km. Nantinya, jalan tol ini bersimpangan dengan lintasan kereta ringan (*light rail transit*) Jakarta.

- **Proyek 6 tol dalam Kota Jakarta sepanjang membutuhkan total investasi Rp41,17 triliun**
- **Pembangunan tol Japek Selatan direncanakan dimulai dari Sadang pada Desember 2018.**

Pembangunan tahap pertama pada dua ruas tol dalam Kota Jakarta dibagi menjadi tiga seksi, yakni seksi A, seksi B Semanan—Grogol sepanjang 9,50 km, dan seksi C Grogol—Kelapa Gading sepanjang 12,40 km.

Dengan adanya kepastian pemenuhan pembiayaan, kata Frans, proses pembangunan tahap pertama akan dipacu untuk bisa beroperasi pada 2021.

Saat ini, progres pembangunan seksi B sudah melewati proses tender kontraktor, sedangkan tender kontraktor seksi C ditargetkan dapat dilakukan pada awal tahun depan.

Secara keseluruhan, proyek enam ruas tol dalam Kota Jakarta diperkirakan membutuhkan investasi Rp41,17 triliun dengan total panjang 69,77 km.

Pembangunan jalan tol yang sebagian besar dibangun melayang tersebut terbagi atas tiga tahap.

Tahap pertama fokus pada pembangunan ruas Semanan—Sunter dan Sunter Pulogadung, tahap kedua Duri Pulo—Kampung Melayu dan Kemayoran—Kampung Melayu, serta tahap ketiga Ulujami—Tanah Abang dan Pasar Minggu—Kasablanka.

Rencananya, setelah tahap pertama, Jakarta Tollroad Development memulai pembangunan tahap kedua dan ketiga secara paralel.

"Untuk *financial close* dua tahap lainnya akan kami lihat lagi sambil pembangunan berjalan. Namun, pembangunan seluruh ruas dijadwalkan selesai pada 2024," ujar Frans.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang diterima *Bisnis*, dari total 48 ruas tol yang tengah diproses atau telah memulai pembangunan, baru 21 ruas yang sudah meneken pemenuhan pembiayaan, 13 ruas lainnya memilih menggunakan skema *contractor pre-financing* (CPF) atau pendanaan dengan dana kontraktor lebih dahulu dalam memulai proyek, dan 14 ruas lainnya belum menandatangani perjanjian kredit ataupun CPF.

Adapun, rencana pemenuhan pembiayaan terdekat akan dilakukan untuk ruas tol Pekanbaru—Dumai sebesar Rp6,40 triliun dan *cash deficiency support* sebesar Rp2 triliun dari Bank Mega.

JAPEK SELATAN

Sementara itu, pembangunan jalan tol Jakarta—Cikampek II Selatan atau Japek Selatan direncanakan dimulai dari Sadang pada Desember 2018.

Proses penetapan lokasi atau penlok diharapkan segera tuntas agar jalan tol sepanjang 64 km itu bisa memulai tahap konstruksi.

Direktur Keuangan & Administrasi PT Jasamarga Japek Selatan I.B.K. Yudharta mengatakan bahwa saat ini tahap sosialisasi sudah dimulai. Awal pekan ini, katanya, sosialisasi persiapan pengadaan tanah digelar di dua desa di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.

Yudharta menuturkan bahwa penlok menjadi kewenangan dari pemerintah daerah.

"Kami masih menunggu penlok dan untuk konstruksi kami dahulukan di paket tiga, mulai dari Sadang," ujarnya saat dihubungi *Bisnis*, Rabu (10/10).

Proyek jalan tol Japek Selatan membentang dari Jatiasih hingga Sadang. Pembangunannya dibagi menjadi enam seksi, yakni Jatiasih—Bantar Gebang, Bantar Gebang—Setu, Setu—Sukaragam, Sukaragam—Taman Mekar, Taman Mekar—Kota Negara, dan Kota Negara—Sadang.

Seiring dengan proses penetapan lokasi, Jasamarga Japek Selatan juga sudah membuka lelang kontraktor. Perusahaan mencari kontraktor yang berpengalaman membangun jalan tol dengan kontrak minimal Rp1 triliun.

Calon peserta lelang juga diharuskan memiliki kemampuan pendanaan CPF dengan nilai pekerjaan minimal Rp3 triliun.

Dengan kata lain, kontraktor yang memenangi lelang akan mendanai konstruksi Japek Selatan terlebih dahulu. Skema ini juga diterapkan pada proyek Japek II Elevated yang konsesinya juga dimiliki PT Jasa Marga Tbk. (JSMR).

Guna mempercepat proses pembebasan lahan, Jasamarga Japek Selatan akan menalangi biaya pengadaan lahan terlebih dahulu.

Yudharta menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang sudah ditandatangani dengan BPJT, nilai pengadaan lahan mencapai Rp3,69 triliun.

Perusahaan akan menarik pinjaman dari perbankan untuk membiayai pengadaan lahan dan juga mendanai konstruksi jalan tol. Perjanjian pinjaman diharapkan bisa berlangsung pada akhir tahun ini setelah syarat-syarat pinjaman bisa dipenuhi perseroan.

Di luar pengadaan lahan, investasi pembangunan jalan tol Japek Selatan mencapai Rp14,70 triliun.

Menurut Yudharta, jalan tol Japek Selatan sangat penting untuk mengurai kemacetan di jalan tol Jakarta—Cikampek.

Rasio volume berbanding kapasitas atau *volume capacity ratio* di jalan tol Jakarta—Cikampek telah mencapai 1,4 atau melampaui ambang batas normal 0,8.

Bila sudah beroperasi, jalan tol Japek Selatan diyakini bisa memecah kepadatan lalu lintas di jalan tol Jakarta—Cikampek yang saat ini trafiknya sudah melampaui kapasitas.

Selain Japek Selatan, JSMR melalui PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek sudah memulai konstruksi jalan tol melayang atau Japek Elevated sepanjang 38,60 km. B

Judul	**Lelang Tunggu Kesepakatan Soal Tarif**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Proses pelelangan badan usaha pelaksana Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I dengan perkiraan investasi Rp 1,67 triliun masih harus menunggu kesepakatan perusahaan daerah air minum mengenai komponen penunjang tarif.		

Lelang Tunggu Kesepakatan Soal Tarif

JAKARTA — Proses pelelangan badan usaha pelaksana Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I dengan perkiraan investasi Rp1,67 triliun masih harus menunggu kesepakatan perusahaan daerah air minum mengenai komponen penunjang tarif.

Sebelumnya, proses permintaan penawaran atau *request for proposal* dari badan usaha untuk menuju proses lelang ditargetkan dapat dimulai pada akhir September 2018 setelah studi mengenai tarif dasar penyerapan air curah ditetapkan Rp3.200 per meter kubik.

Ketua Tim KPBU SPAM Regional Jatiluhur I Haris Zulkarnain mengatakan bahwa perusahaan daerah air minum (PDAM) yang akan mendistribusikan air di wilayah layanan SPAM Jatilihur I sebetulnya telah bersepakat mengenai nilai tarif yang ditetapkan sebesar Rp3.200/m3. Namun, pembahasan mengenai sejumlah komponen penunjang tarif dengan PDAM masih belum tuntas.

Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai rencana kenaikan tarif secara berkala. Berdasarkan hitungan kelayakan investasi proyek, kenaikan tarif secara berkala dipatok 10% dalam waktu 2 tahun sekali.

"Untuk tarif pada dasarnya PDAM sudah setuju, tetapi dalam komponen tarif masih ada beberapa yang perlu penjelasan. Salah satunya mengenai besaran kenaikan berkala," kata Haris kepada *Bisnis*, Rabu (10/10).

Kendati demikian, menurutnya, proses penjelasan tersebut sudah hampir rampung dan ditargetkan pada minggu ketiga bulan ini proses pelelangan sudah dapat dimulai.

Komponen kenaikan tarif secara berkala masuk dalam daftar pagu anggaran dalam pelelangan proyek yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) itu untuk menyusun dokumen permintaan penawaran dalam menghitung perkiraan investasi, sehingga proses tersebut harus selesai lebih dahulu sebelum lelang dimulai.

"Dari rapat terakhir di KPPIP [Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas], kami didorong untuk paling tidak sampai minggu ketiga Oktober kami bisa mulai lelang."

SPAM Jatiluhur I nantinya melayani air bersih untuk empat daerah, yakni Kab. Karawang, Kab. dan Kota Bekasi, serta Jakarta.

Berdasarkan data KPPIP, SPAM Jatiluhur I akan memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter/detik dengan sumber air baku berasal dari Bendungan Jatiluhur, Jawa Barat. Investasi pembangunan SPAM Jatiluhur I diperkirakan mencapai Rp1,67 triliun.

Dari total kapasitas 5.000 liter/detik, 4.000 liter/detik aliran air akan didistribusikan ke Jakarta. Selain itu, masing-masing 350 liter/detik aliran air akan didistribusikan ke Kab. Bekasi dan Karawang, serta 300 liter/detik untuk wilayah Kota Bekasi. ***(Irene Agustine)***

Judul	**Kontrak 2 Bendungan Belum Bisa Diteken**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa penandatanganan kontrak dua bendungan mundur dari jadwal karena evaluasi dari kelompok kerja belum selesai		

Kontrak 2 Bendungan Belum Bisa Diteken

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa penandatanganan kontrak dua bendungan mundur dari jadwal karena evaluasi dari kelompok kerja belum selesai.

Berdasarkan informasi dari layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), kontrak Bendungan Sadawarna, Jawa Barat seharusnya diteken pada 9 Oktober 2018. Begitu pula dengan kontrak Jlantah, Jawa Tengah yang dijadwalkan diteken pada 1 Oktober 2018.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa penandatanganan kontrak belum dilakukan kendati melewati jadwal pelelangan.

"Evaluasi dari pokja [kelompok kerja] belum selesai," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (11/10).

Biaya pembangunan Bendungan Sadawarna dan Jlantah akan menggunakan anggaran tahun jamak.

Proses lelang Sadawarna meluluskan tiga kontraktor sebagai calon pemenang, yakni PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Wijaya Karya Tbk.

Lelang Bendungan Sadawarna dibagi dalam dua paket. Lelang paket pertama diikuti 91 peserta dengan nilai proyek Rp1 triliun, sedangkan lelang paket kedua diikuti 84 peserta dengan estimasi nilai kontrak Rp940,80 miliar.

Bendungan Sadawarna dirancang dengan kapasitas hingga 49 juta meter kubik dan bisa mengairi lahan 6.000 hektare.

Sementara itu, lelang Bendungan Jlantah meluluskan tiga kontraktor, yakni PT Wijaya Karya Tbk., PT Brantas Abipraya, dan PT Waskita Karya Tbk. Ketiga kontraktor bersaing memperebutkan konstruksi bendungan yang ditaksir mencapai Rp996,33 miliar.

Bendungan Jlantah dibangun untuk meningkatkan intensitas tanam irigasi yang ada seluas 850 hektare dan memasok air untuk lahan irigasi baru seluas 688 hektare. Bendungan ini juga bakal menjadi sumber air baku dengan kapasitas 150 liter per detik dan menghasilkan tenaga listrik 625 kilowatt.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Bendungan Bener, Jawa Tengah dan Tiga Dihaji, Sumatra Selatan juga sudah melewati jadwal penandatangan kontrak.

Informasi dari laman LPSE menunjukkan bahwa kontrak Bendungan Bener dijadwalkan berlangsung 7 September 2018, sedangkan Bendungan Tiga Dihaji pada 5 September 2018.

Sumiarsih mengatakan bahwa sejauh ini kontrak dua bendungan tersebut belum diteken kendati proses lelang sudah menghasilkan pemenang.

Penandatanganan kontrak belum dilakukan karena masih menunggu izin kontrak tahun jamak dari Kementerian Keuangan. Paket pekerjaan konstruksi yang dilelang pada proyek Bendungan Bener dan Bendungan Tiga Dihaji terdiri atas empat paket.

(Rivki Maulana)

Judul	**5 Pemodal Siap Biayai Proyek Infrastruktur**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Lima perusahaan asal China, Hong Kong, Belanda, dan Malaysia berkomitmen membiayai sejumlah proyek Infrastruktur di Indonesia.		

5 Pemodal Siap Biayai Proyek Infrastruktur

MANGUPURA, Bali — Lima perusahaan asal China, Hong Kong, Belanda, dan Malaysia berkomitmen membiayai sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia.

Ema Sukarelawanto
ema.sukarelawanto@bisnis.com

Kepala Badan Koordinasi Penanamam Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan belum bisa menyampaikan secara detail kepada publik tentang lima perusahaan beserta total nilai investasinya.

"Sudah ada investor yang berkomitmen, tetapi saya belum mendapat izin mengumumkan ke publik," katanya di sela-sela Forum Infrastruktur yang digelar BKPM bersama PT Bank HSBC Indonesia yang merupakan kegiatan paralel Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group, Kamis (11/10).

Pada acara Hi Tea Event, Lembong bertemu lima investor asal China, Hong Kong, Belanda, dan Malaysia untuk membicarakan proyek infrastruktur yang meliputi pembangkit listrik, pelabuhan, konstruksi, dan logistik dengan nilai investasi mencapai US$31,4 miliar.

Menurut Lembong masih diperlukan konsolidasi dan koordinasi yang kuat antara moneter, fiskal dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional.

> **Sekuritisasi aset-aset infrastruktur ke pasar modal untuk memicu arus modal masuk ini semakin mendesak.**

Forum Infrastruktur BKPM-HSBC yang dihadiri 500 investor itu merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan para investor dalam dan luar negeri, baik di sektor infrastruktur maupun lembaga keuangan dan perbankan.

"Acara ini membahas mengenai peluang pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia serta perkembangan-perkembangan terkini dalam skema pendanaan infrastruktur," katanya.

Kegiatan tersebut, kata Lembong, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menggeser pendanaan infrastruktur kepada swasta, termasuk ke pasar modal pada saat nilai tukar rupiah tertekan.

"Sekuritisasi atau menguangkan aset-aset infrastruktur ke pasar modal untuk memicu arus modal masuk ini semakin mendesak," katanya.

Dia menyebut bahwa saat ini cukup banyak pula investor dari Eropa seperti perusahaan asuransi dan reksa dana yang tertarik mempelajari instrumen infrastruktur serta ingin masuk ke pasar modal. Ada pula sejumlah investor, terutama yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan China yang ingin masuk ke sektor riil.

Lembong mengatakan definisi infrastruktur perlu diperluas agar lebih fleksibel dan dinamis untuk menawarkan peluang investasi. Dia memberi contoh sektor telekomunikasi termasuk infrastruktur melalui proyek pemasangan kabel fiber optik atau jaringan komunikasi untuk memperluas akses internet.

Deputy Chairman and Chief Executive HSBC Asia Pacific Peter Wong mengatakan Indonesia tidak hanya memiliki populasi yang besar, tetapi juga memiliki banyak potensi yang siap digali dan dimanfaatkan.

CISUMDAWU

Dari Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan *twin tunnel* bagian kanan jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) tuntas pada November 2018.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan berdasarkan laporan satuan kerja Cisumdawu terowongan yang menuju arah Bandung dari Sumedang tersebut pengerjaannya tengah dikebut seiring dengan sudah lebih dulu selesainya terowongan arah Sumedang.

"Terowongan kembar sebelah kanan sepanjang 472 meter ditargetkan bisa tembus pada November 2018," katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (11/10).

Menurutnya, di seksi II fase II Rancakalong—Sumedang merupakan pekerjaan terberat ada di penuntasan terowongan. Saat ini posisi tunnel yang sebelah kanan menurutnya baru bisa ditembus 392 meter.

"Yang sebelah kiri yang tembus itu sudah selesai kontruksinya. Memang pengerjaan *twin tunnels* ini yang paling berat dalam pembangunan Tol Cisumdawu seksi ini," paparnya.

Dari capaian di proses tersebut secara keseluruhan perkembangan pembangunan *twin tunnels* jalan tol Cisumdawu hingga saat ini sudah mencapai 80%. "Ini kalau sudah selesai, maka beban kendaraan di wilayah Cadas Pangeran bisa beralih, dari desainnya juga aman untuk kendaraan berat melintas," tuturnya.

Iwa menuturkan dengan perkembangan terbaru tersebut seksi II Cisumdawu sepanjang 17,05 kilometer diharapkan bisa beroperasi pada Maret 2019 dengan catatan pembebasan lahan tuntas 100%. "Baru seksi II fase satu itu yang fisiknya sudah 100%. Kalau lahan seluruhnya belum selesai seksi ini baru bisa beroperasi Desember 2019," ujarnya.

Persoalan lahan memang masih mengganjal karena untuk seksi II fase II sepanjang 10,70 kilometer tersebut kelelusaan lahan saat ini baru mencapai 88,47% dan proses konstruksinya 51,147%. "Lahan selesai 100% di seksi ini jika sengketa lahan, penggantian aset bangunan sekolah dan desa selesai. Pihak Satker menargetkan masalah ini bisa diselesaikan pada Oktober ini."

Sementara itu, untuk seksi I Cileunyi-Rancakalong sepanjang 12,02 kilometer masih berkutat pada urusan pembebasan lahan yang baru mencapai 60%. Menurutnya lahan yang berada di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sejumlah titik lainnya sudah selesai diukur.

Judul	**Menuju Pemulihan Tanah Kaili**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	John Ario Katili ahli geologi pertama di Indonesia, lebih dari 30 tahun silam telah memperingatkan akan adanya gempa besar berikut fenomena geologi di Kota Palu.		

John Ario Katili, ahli geologi pertama di Indonesia, lebih dari 30 tahun silam telah memperingatkan akan adanya gempa besar berikut fenomena geologi di Kota Palu.

▸ DAMPAK GEMPA SULTENG

Menuju Pemulihan Tanah Kaili

Amri Nur Rahmat
amri.nurrahmat@bisnis.com

Posisi Palu yang dilintasi patahan atau sesar besar dan aktif, sepanjang sekitar 1.000 kilometer, dengan posisi membelah dari Teluk Palu sampai Teluk Tondano tepatnya Koro, menjadi landasan kekhawatiran Katili bakal terjadinya bencana geologi di daerah tersebut.

Pada akhirnya, kekhawatiran Doktor Geologi pertama dari Institut Teknologi Bandung ini pun terbukti pada 28 September 2018.

Gempa dengan magnitudo 7,4 Skala Richter (SR) disertai tsunami dan fenomena likuifaksi meluluhlantakkan sebagian besar Kota Palu, Tanah Kaili. Kehancuran itu diikuti oleh beberapa daerah yang juga terdampak aktivitas sesar Palu Koro.

Episentrum gempa yang berada di Kabupaten Donggala tersebut mengakibatkan lebih dari 67.310 rumah atau bangunan dan 2.736 sekolah rusak, 20 fasilitas kesehatan luluh lantak serta 12 titik infrastruktur jalan rusak berat.

Kerugian sementara ditaksir lebih dari Rp10 triliun dengan kemungkinan lebih besar jika pendataan komprehensif telah dirampungkan.

Sejauh ini, korban meninggal dunia secara kumulatif dari wilayah terdampak bencana sebanyak 2.065 jiwa yang telah dievakuasi dan dimakamkan baik secara massal maupun oleh keluarga korban. Kemudian, korban yang dinyatakan hilang mencapai 680 jiwa, sedangkan 82.775 jiwa mengalami luka-luka.

Pada bagian selatan Kota Palu tepatnya di Kelurahan Petobo, terdapat 2.050 rumah disapu lumpur hingga nyaris tanpa sisa sebagai dampak dari fenomena likuifaksi.

Di wilayah tersebut, bahkan diperkirakan masih banyak warga yang terjebak dan belum bisa dievakuasi. Hal ini juga berdasarkan laporan dari warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya di kawasan itu.

Tak sedikit dari mereka yang masih menanti harapan di Petobo usai 12 hari Palu diamuk bencana alam.

Irsan (43), warga Kelurahan Biromaru, Kabupaten Sigi, daerah yang berbatasan langsung dengan Petobo, adalah salah satu korban yang selamat. Lima orang anggota keluarganya masih tertimbun di bawah lumpur. Hidup atau tidak, tak ada yang bisa menebak.

"Mereka sepupu dari sa [saya] punya bapak. Ya, kalau Tuhan punya kehendak tidak ada yang tidak mungkin, mereka masih hidup," kata Irsan kala ditemui *Bisnis* tak jauh dari kawasan likuifaksi di Petobo, Rabu (10/10).

Dia menjadi salah satu saksi mata, melihat rumah-rumah tertelan lumpur dan menyebutnya menjadi teguran dari Tuhan. Kala kejadian, Irsan melihat orang-orang berlarian seolah berlomba dengan lumpur yang terus menggulung, tanpa mampu berbuat apa apa.

Tubuhnya kaku dan hanya bisa tercengang melihat alam bekerja hari itu. Dilema antara ingin segera menyelamatkan orang-orang yang hampir disapu lumpur dan pulang segera. "Rumah tidak jauh dari sini. Sa punya anak yang usianya baru 48 hari pas kejadian. Sa lari pulang ambil mereka," kata Irsan dengan logat Palu yang kental.

Dia takut jika saja lumpur likuifaksi itu menjangkau dan turut menyapu rumahnya. Tanpa pikir panjang, Irsan memboyong istri dan anaknya segera meninggalkan rumah. Tak membawa apa-apa. Hanya pakaian di badan juga selimut untuk bayinya.

"Namun, *Alhamdulillah* lumpurnya tidak sampai di rumah. Aneh memang ini kejadian. Rumah, pohon, jalan semua didorong lumpur," tuturnya.

Meski tak sampai terkena likuifaksi, rumah Irsan juga terdampak gempa, mengingat beberapa bagian rusak dan nyaris roboh. Selanjutnya, dia memilih tinggal di posko pengungsian. Setelah memastikan anak dan istrinya aman, Irsan kembali ke Petobo, melihat kondisi permukiman itu.

Listrik padam dan tak ada sama sekali penerangan yang memadai, suara minta tolong masih nyaring terdengar dari reruntuhan bangunan yang sebagian besar sudah terkubur.

Sedihnya, sebab tak ada satu pun yang berani mengevakuasi. Tak jelas titik pasti suara-suara itu berasal. Warga enggan mendekat lantaran kondisi tanah masih sangat basah. Tak ada alat evakuasi yang memadai. Kata Irsan, mendekat ke lokasi kejadian sama saja bunuh diri.

"Sampai Minggu (30/9) malam, suara-suara minta tolong bahkan masih terdengar, tapi kita bisa apa. Itu tanah masih basa lumpur. Sampai 2 hari lalu saja, kalau diinjak kaki tenggelam sampai paha," Irsan berkisah.

Hampir setiap hari, Irsan mengunjungi lokasi itu. Lima unit eskavator mulai bekerja 3 hari setelah fenomena alam itu terjadi. Tak hanya Irsan, keluarga-keluarga lain juga berdatangan. Harapan yang sama dimiliki Irsan. Kalau-kalau kerabat mereka masih ditemukan dalam kondisi bernyawa.

Demikian pula dengan Alex (51), salah satu warga di Kelurahan Petobo. Dalam hitungan menit, rumahnya hilang sekejap mata. Beruntung, Irsan bersama istri dan tiga orang anaknya berhasil selamat. Ada kekuatan lain yang mampu membuat Alex dan keluarga bergerak lebih cepat dari sapuan lumpur.

"Sa [sudah] tidak ada lagi rumah. Habis itu di atas sana," kata Alex sembari menunjuk lokasi rumahnya yang hanya sisa bayang-bayang di kepala Alex.

Dia mengaku ikhlas, meski kehilangan rumah dan segala harta bendanya. Alex merasa bersyukur seluruh anggota keluarganya bisa selamat. Dia lebih banyak diam, sembari menarik napas dalam-dalam. Ditatapnya Petobo, kawasan padat penduduk yang kini menjadi tanah lapang.

PROSES PENCARIAN

Beberapa warga masih terlihat mondar-mandir. Ada yang membawa cangkul, sekop, dan alat berat manual lainnya. Untuk alat berat hingga kemarin, Kamis (11/10), total ada tujuh eskavator yang digunakan untuk proses evakuasi.

Anjing pelacak dari tim kepolisian juga masih bekerja. Sebanyak lima ekor anjing pelacak turut mencari. Hingga Rabu (10/10), tim Basarnas mencatat baru 174 jenazah yang sudah ditemukan.

"Kami sudah bagi lima tim. Ini sudah ada bantuan dari teman-teman potensi 55 orang dan TNI. Kami masih menunggu laporan warga tentang keluarganya yang hilang," ungkap Komandan Basarnas Petobo, Atitus Charles Ibe.

Proses pencarian masih terus dilakukan meski pemerintah telah menyatakan tanggap darurat berakhir, kemarin. Berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah provinsi, evakuasi dipertimbangkan tidak dilanjutkan. Lokasi diusulkan menjadi tempat penguburan massal dan masyarakat terdampak disiapkan opsi relokasi permukiman.

Lain di Palu Selatan, lain juga di kawasan barat Palu. Fenomena alam lain tampak di kawasan Perumnas Balaroa, Kota Palu. Terjadi pengangkatan jalan dan tanah ambles di perumahan dengan luas areal 47,8 hektare itu. Hingga 11 hari pencarian, tim evakuasi berhasil menemukan 118 jenazah.

Komandan Yonif Para Raider 432/WSJ Mayor Inf. Gustiawan mengatakan, korban meninggal dunia ditemukan di reruntuhan Perumahan Balaroa. "Pencarian yang dilakukan selama 11 hari oleh TNI dibantu Basarnas dan relawan menemukan 150 dewasa dan 38 anak-anak," kata Gustiawan.

Pencarian korban di reruntuhan Perumahan Balaroa sangat menyulitkan. Ini akibat banyaknya puing-puing bebatuan yang hancur total lantaran gempa bumi. Evakuasi korban di Perumahan Balaroa dibantu dengan menggunakan 13 unit alat berat milik TNI, terdiri dari 11 unit eskavator dan dua unit buldoser.

"Alat berat itu sangat membantu TNI, Basarnas, relawan, dan warga setempat untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban di bawah reruntuhan bangunan," terangnya.

Dengan melihat keadaan yang masih jauh dari kondusif, masa tanggap darurat rencananya diperpanjang hingga 26 Oktober. Hal itu dikarenakan sejumlah lokasi evakuasi masih terkendala medan yang sulit.

Warga terdampak gempa dan tsunami masih enggan pulang ke rumah. Terlebih, gempa susulan masih kerap terjadi meski dengan skala kecil. Di Kota Palu, tercatat ada 13 titik posko pengungsian. Lokasi terbanyak yang menampung warga terdampak bencana yaitu di Lapangan Vatulemo.

Sebanyak 1.500 korban gempa dan tsunami mengisi tenda-tenda darurat di lapangan yang berada tepat di depan Kantor Wali Kota Palu. Meski dengan makanan seadanya, warga memilih tetap tinggal di lokasi pengungsian karena masih trauma.

Hampir setiap hari warga mengonsumsi mie instan. Salah satu warga, Rusni bertutur kepada *Bisnis*, untuk memeroleh bantuan berupa kebutuhan pokok, warga harus mengantre dengan menyertakan kartu keluarga (KK).

"Itu pun harus menunggu satu hari lagi untuk mendapatkan bantuan," ungkap warga Kelurahan Talise, Kota Palu ini.

Jika ada warga yang sudah kehilangan KK, mereka diminta untuk membawa surat keterangan dari pejabat setempat, dalam hal ini ketua RT ataupun camat. Adapun, empat titik posko resmi sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Sulteng, di antaranya Kantor Gubernur Sulteng, Korem, Kodim, dan rumah jabatan Wakil Wali Kota Palu.

Terkait dengan pengambilan bantuan dengan menggunakan KK, Wali Kota Palu Hidayat Lamakarate menerangkan bahwa hal itu dilakukan untuk menghindari pembagian bantuan yang tidak merata.

"Penggunaan KK itu agar warga bisa terdata dengan baik untuk memperoleh bantuan. Jangan sampai sudah ada yang ambil, nanti datang lagi ambil sedangkan masih ada yang belum dapat," ungkap Hidayat.

RELOKASI PERMUKIMAN

Pihaknya berkomitmen untuk segera melakukan upaya penanggulangan agar para korban gempa dan tsunami bisa segera pulih. Termasuk dalam hal ketersediaan perumahan. Hingga saat ini, pemerintah kota masih melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan kawasan relokasi warga.

Sebelumnya, pemerintah telah mengidentifikasi sementara lima titik alternatif untuk relokasi permukiman penduduk yang terdampak bencana.

Adapun, lokasi itu tersebar di tiga kecamatan, yaitu 1 lokasi seluas 79,30 di Kecamatan Palu Barat, 2 lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 200 ha dan 217 ha serta 2 lokasi di Kecamatan Palu Timur masing-masing seluas 57 ha dan 99,63 ha.

Penetapan lima titik alternatif itu mengacu pada kriteria yang dikedepankan dalam pemilihan alternatif lokasi antara lain bebas dari ancaman bahaya baik patahan aktif, likuifaksi, longsor, tsunami, banjir, maupun mikrozonasi tinggi gempa bumi.

Syarat lainnya adalah wilayah itu bukan sempadan pantai, sempadan sungai, tidak berada di kawasan lindung atau kawasan lain dengan kelerengan lebih dari 15%, memiliki akses yang cukup baik ke sumber air, serta penguasaan tanah hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB) telah habis.

Relokasi ini juga mengacu pada Peraturan PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana rekonstruksinya wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai salah satu bentuk membangun lebih baik.

Berdasarkan pantauan *Bisnis*, aktivitas di Kota Palu mulai berangsur pulih meski hanya terbatas pada beberapa titik. Sistem kelistrikan juga telah mulai mendekati normal, sejalan dengan keberhasilan PLN memulihkan 45 penyulang (*feeder*) dan 7 gardu induk di Palu, Sigi, dan Donggala. Selain itu, PLN juga berhasil memperbaiki 1.192 gardu distribusi dari total 2.253 gardu distribusi yang rusak.

Sebelumnya, PLN juga telah berhasil memperbaiki 7 gardu induk (GI) atau 100% GI yang ada di Palu, Donggala, dan Sigi. Seluruh GI tersebut kini telah kembali beroperasi.

Demikian pula dengan infrastruktur stategis lainnya, seperti Bandara Mutiara Sis Al-Jufri dan Pelabuhan Pantoloan dengan kapasitas saat ini 37.000 TEUs. Demikian halnya akses jalan yang menghubungkan wilayah terdampak dengan provinsi lain, sudah sangat optimal dalam menunjang upaya rekonstruksi Kota Palu dan sekitarnya. (k38)

PERKEMBANGAN DAMPAK GEMPA PALU DAN DONGGALA PER 10 OKTOBER 2018*

Gempa dengan magnitudo 7,4 Skala Richter (SR) disertai tsunami dan fenomena likuifaksi meluluhlantakkan sebagian besar Kota Palu, Tanah Kaili. Kehancuran itu diikuti oleh beberapa daerah yang juga terdampak aktivitas sesar Palu Koro. Episentrum gempa yang berada di Kabupaten Donggala tersebut mengakibatkan lebih dari 67.310 rumah atau bangunan dan 2.736 sekolah rusak, 20 fasilitas kesehatan luluh lantak serta 12 titik infrastruktur jalan rusak berat.

- Jumlah korban meninggal dunia: 2.065 jiwa
- Jumlah korban hilang: 680 jiwa
- Korban luka-luka: 4.612 jiwa
- Masyarakat yang mengungsi: 82.775 jiwa
- Perkiraan kerugian: Rp10 triliun
- Masyarakat yang tinggal di Sulteng: 74.044 jiwa (mengungsi di 112 titik)
- Masyarakat yang meninggalkan Sulteng: 8.731 jiwa
- Jumlah rumah yang mengalami kerusakan parah: 67.310 unit

Sumber: dari berbagai sumber, diolah
*) Data sementara

Sulteng Butuh Masa Tanggap Darurat Lebih Lama

redaksi@bisnis.com

Masifnya kerusakan pascagempa dan tsunami di wilayah Donggala dan Palu tak hanya menimbulkan kisah duka yang mendalam dari para korban. Pada sisi lain, infrastruktur dasar dan properti yang luluh lantak melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah.

Atas dasar berbagai pertimbangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan untuk memperpanjang masa tanggap darurat. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyatakan bahwa masa tanggap darurat diperpanjang hingga 2 pekan ke depan.

"Jadi, [masa tanggap darurat] terhitung mulai 13 Oktober hingga 26 Oktober. Itu dilakukan karena masih banyak pekerjaan kedaruratan yang perlu ditangani," ucap Longki di Palu, kemarin.

Tak sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membenahi kawasan terdampak gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018. Terhitung hingga Kamis (11/10), atau 12 hari pascakejadian itu masih banyak lokasi yang belum bisa dievakuasi.

Terlebih, sejumlah daerah yang mengalami kerusakan parah masih membutuhkan waktu cukup panjang untuk memulihkan kondisinya. "Kami masih butuh waktu untuk membenahinya sampai selesai," ujarnya.

Dengan merujuk pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga kemarin, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 2.065 orang. Sebanyak 680 orang dinyatakan hilang, sebanyak 4.612 orang luka-luka.

Sementara itu, sebanyak 82.775 orang mengungsi, 74.044 orang memilih tetap tinggal di Sulteng yang terbagi di 112 titik dan 8.731 orang lainnya memilih untuk meninggalkan Sulteng.

Tercatat pula jumlah rumah yang mengalami kerusakan parah mencapai 67.310 unit. Melalui tim Damage and Loses, BNPB juga memperkirakan total kerugian akibat bencana alam itu sekitar Rp10 triliun.

Tim Damage and Loses Assessment dibentuk untuk menghitung besar kerugian dan kerusakan. Tim ini juga bergerak melakukan perhitungan biaya pemulihan usai bencana. Tim bukan hanya bergerak di Kota Palu, melainkan juga di Kabupaten Sigi dan Donggala, serta sejumlah daerah terdampak lainnya. (k38)

Judul	**Fokus Harus Diarahkan ke Tanah Papua**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)		
Resume	Destinasi wisata di Provinsi Papua dan Papua Barat berpotensi menyumbang 25% terhadap total kunjungan wisatawan secara nasional per tahun, apabila pemerintah serius dalam membangun infrastruktur penunjang.		

Fokus Harus Diarahkan ke Tanah Papua

MANOKWARI — Destinasi wisata di Provinsi Papua dan Papua Barat berpotensi menyumbang 25% terhadap total kunjungan wisatawan secara nasional per tahun, apabila pemerintah serius dalam membangun infrastruktur penunjang.

Yanita Petriella
yanita.petriella@bisnis.com

- **Provinsi Papua Barat terkendala infrastruktur jalan dan listrik untuk mengembangkan potensi pariwisatanya.**
- **Provinsi Papua berniat melejitkan wisata Carstensz Pyramid, tetapi terkendala infrastruktur yang minim untuk keamanan turis.**

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari menjelaskan, potensi bisnis wisata di kedua provinsi Tanah Papua itu sangatlah besar karena keduanya memiliki kekhasan dan keotentikan budaya.

Menurut datanya, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kedua provinsi tersebut berkontribusi sekitar 8% terhadap total kunjungan turis asing ke Tanah Air setiap tahunnya.

Adapun, kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke Papua dan Papua Barat mencakup 2% dari total pergerakan turis domestik setiap tahunnya.

"Saat ini kunjungan wisatawan ke Tanah Papua kecil sekali, karena turis lebih banyak ke Bali, Jakarta, dan Batam. Untuk ke Tanah Papua membutuhkan biaya transportasi yang mahal. Jauh lebih murah kalau ke Singapura atau Jepang bagi wisnus. Jadi, jika pemerintah serius membangun infrastruktur penunjang, saya yakin kontribusi kunjungan wisatawan ke Papua dan Papua Barat bisa naik menjadi 25% per tahun," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (11/10).

Dia berpendapat, selain masalah akses transportasi, tidak banyaknya wisatawan yang datang ke Tanah Papua disebabkan karena kurang menariknya pengemasan produk yang ditawarkan dan minimnya amenitas di lokasi destinasi wisata.

Padahal, Bumi Cendrawasih memiliki destinasi wisata alam dan kawasan endemik burung surgawi (*birds of paradise*) yang mampu menarik kunjungan wisatawan terutama pelancong asing.

"Ini memang perlu keseriusan pemerintah. Di Tanah Papua banyak destinasi yang tak dimiliki negara lain terutama untuk keanekaragaman hayatinya. Infrastruktur penunjang ekoturisme di Tanah Papua inilah yang harus segera dibangun," tutur Azril.

Saat ditemui *Bisnis* di kediamannya, Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat Yosias Saroy menuturkan, sebenarnya ada banyak potensi pariwisata di kabupatennya. Misalnya, gua terdalam kedua di dunia, danau Anggi Gida (Danau Perempuan) dan Anggi Jigi (Danau Laki), gua di Dohu, air terjun, penangkaran kupu-kupu, penangkaran burung cendrawasih di Kuaw, rumah adat kaki seribu, dan jalur perlintasan bukit.

"Setiap bulannya, wisatawan yang datang ke wilayah kami mencapai 10 hingga 15 orang. Namun, turis yang datang belum dikenakan pajak dan retribusi karena peraturan daerahnya masih digodok. Pasalnya, Kabupaten Pegaf ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang baru berdiri sejak 2012."

Saat ini, sebut Yosias, Pemkab Pegaf merencanakan pembangunan *homestay* yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaannya. Kabupaten Pegaf juga tengah menata aturan pariwisata, yakni dengan melarang didirikannya permukiman dan keramba di dekat danau.

Dia mengungkapkan, saat ini yang dibutuhkan untuk menunjang sektor pariwisata adalah pembangunan infrastruktur jalan dan listrik. Sebab, belum semua desa di kabupaten tersebut memiliki aliran listrik dan jalan penghubung.

Wisata Bumi Cendrawasih Terkendala Infrastruktur

Meskipun memiliki potensi magnet pariwisata yang luar biasa, Provinsi Papua dan Papua Barat terkendala pembangunan infrastruktur jalan dan listrik yang tak kunjung tuntas. Padahal, jika digarap serius Bumi Cendrawasih dapat memberikan kontribusi sebesar 25% terhadap total kunjungan wisman dan wisnus nasional per tahun.

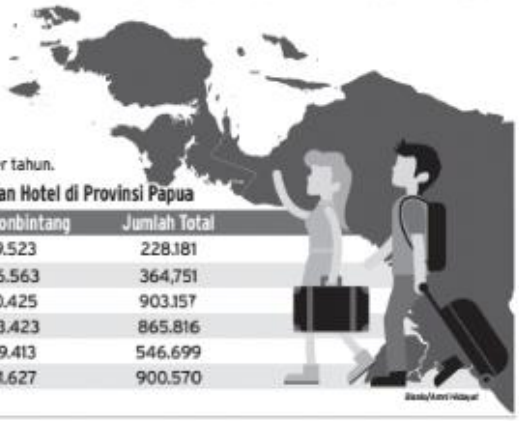

Jumlah Tamu WNA & WNI Menurut Golongan Hotel di Provinsi Papua

Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Nonbintang	Jumlah Total
2011	58.658	169.523	228.181
2012	108.188	256.563	364,751
2013	392.732	510.425	903.157
2014	362.384	503.423	865.816
2015	267.286	279.413	546.699
2016	428.943	471.627	900.570

Sumber: BPS Provinsi Papua, diolah

Bisnis/Azmi Hidayat

OKUPANSI HOTEL

Ditemui secara terpisah, anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua Barat Adri Syawal menuturkan, okupansi hotel di Provinsi Papua Barat pada akhir tahun lalu mencapai 72% dan diproyeksikan mencapai 75% hingga akhir tahun ini.

Tren peningkatan okupansi kamar hotel tersebut merupakan dampak dari banyaknya maskapai yang melakukan penerbangan langsung ke Papua Barat seperti ke Manokwari dan Sorong.

"Kenaikan okupansi hotel setiap tahunnya ini karena ada penerbangan langsung dari Surabaya, Ujung Pandang, dan lain sebagainya. Selain itu, karena ada penambahan kamar di Papua Barat. Saat ini terdapat 30 hotel di Papua Barat."

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Homestay Raja Ampat Christian menambahkan, jumlah wisman dan wisnus yang menginap di *homestay* Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat mencapai sekitar 500 hingga 1.000 orang pada tahun lalu.

Hingga akhir tahun ini, diperkirakan jumlah wisatawan yang menginap di *homestay* bisa mencapai 2.000 orang. Adapun, *homestay* di Kabupaten Raja Ampat memiliki total 300 kamar.

"Yang paling banyak wisatawannya itu dari mancanegara. Biasanya ramai datang pada periode September hingga Maret. Namun, untuk April hingga Agustus tahun ini tak begitu ramai karena pengaruh angin di sini," ujarnya.

Apabila sedang tak ramai dikunjungi wisatawan, lanjutnya, perolehan pendapatan seluruh *homestay* di Raja Ampat mencapai Rp800 juta hingga Rp1 miliar dalam sebulan. Namun, apabila banyak wisatawan yang tengah berlibur, omzet *homestay* di Raja Ampat bisa mencapai Rp2 miliar per bulan.

"Agustus itu bulan sepi, tapi kami bisa peroleh Rp2 miliar. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, perolehan bisnis *homestay* beda-beda di Raja Ampat, ada yang tahun ini naik pendapatannya ada yang turun," kata Christian.

Dari Provinsi Papua, Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Noak Kalise mengungkapkan, sektor pariwisata memiliki peranan penting terhadap peningkatan ekonomi daerah. Terlebih, provinsi tersebut memiliki banyak destinasi wisata seperti pegunungan Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid, lalu wisata di Wamena.

"Yang harus dilakukan saat ini adalah pembenahan dan promosi paket wisata. Tentu kami sadari pembenahan tak dapat dilakukan sendiri karena dana kami terbatas, harus bermitra dengan lain terutama dengan pihak swasta," ucapnya.

Dari sisi pelaku usaha, pemilik operator Adventure Carstensz Maximus Tipagau memaparkan, untuk menunjang wisata Pegunungan Cartensz dibutuhkan pembangunan bandara perintis dan *helipad* di Uginba, yang telah ditetapkan sebagai desa wisata sejak 2014.

Selain itu, sebutnya, dibutuhkan fasilitas jalan setapak dan jembatan yang lebih aman bagi turis di sepanjang jalur pendakian Sugapa—Uginba—Carstensz.

"Kami juga butuh *shelter* wisata dan toilet di sepanjang jalur pendakian, serta fasilitas kereta gantung yang melintasi puncak Carstensz dan lembah danau-danau untuk mengurangi beban lingkungan akibat banyaknya turis mendaki," tuturnya.

Judul	**Minat Ada, Pembelian Minim**	Tanggal	Jumat, 12 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Pertumbuhan properti di Indonesia masih mengalami progres yang merangkak. Demikian pula dengan lahan kawasan industri yang masih stagnan.		

Minat Ada, Pembelian Minim

JAKARTA — Pertumbuhan properti di Indonesia masih mengalami progres yang merangkak. Demikian pula dengan lahan kawasan industri yang masih stagnan.

Finna U. Ulfah
redaksi@bisnis.com

Director Industrial and Logistics Services Colliers International Indonesia Rivan Munansa mengatakan secara umum selama kuartal tiga hingga akhir 2018 kondisi sektor industri diperkirakan terus berjalan di tempat.

"Diperkirakan masih stagnan walaupun minat terhadap lahan industri sedikit meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya," ujar Rivan saat dihubungi *Bisnis*, Rabu (10/10).

Adanya permintaan tersebut, katanya, belum mampu menopang angka penjualan lahan industri yang memuaskan akibat masih banyak perusahaan yang cenderung bersikap menunggu dan belum melakukan keputusan pembelian.

Industri yang masih tinggi angka permintaannya terhadap pasar lahan industri adalah industri logistik, otomotif, dan perusahaan *fast moving consumer goods* (FMCG). Permintaan tersebut dikarenakan pasar Indonesia yang begitu luas dan perusahaan industri terkait masih terus berkembang dengan baik.

"Tetapi memang terdapat beberapa pengembang dengan lokasi pengembangan yang strategis, yaitu lokasi yang terdekat dengan Jakarta, memang tetap membukukan penjualan," kata Rivan.

Rivan memprediksi kondisi sektor kawasan industri akan mulai pulih dan kembali berkembang pada 2019 setelah pemilihan umum berakhir.

> **Industri yang masih tinggi angka permintaannya terhadap pasar lahan industri adalah logistik, otomotif, dan perusahaan *fast moving consumer goods* (FMCG).**

Sektor kawasan industri, lanjut Rivan, memerlukan stimulus seperti keadaan politik dan ekonomi yang lebih baik, seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah yang stabil, untuk dapat membantu sektor industri kembali tumbuh.

Sementara itu, Head of Research PT Jones Lang LaSalle James Taylor mengatakan pertumbuhan pergudangan di kawasan industri sedikit lebih baik dibandingkan dengan aktivitas properti lainnya.

"Aktivitas *e-commerce* memberikan dampak positif terhadap permintaan kawasan pergudangan modern," kata James saat acara pemaparan *Jakarta Property Market Update Third Quarter 2018*, Rabu (10/10).

Dia memaparkan saat ini ada sekitar 1,5 juta m2 kawasan pergudangan modern yang berada di kawasan Jabodetabek dan masih akan terus bertambah 350.000 m2 hingga 2021. Dia mencontohkan Logos yang sedang mengembangkan 155.000 m2 gudang modern yang akan selesai dibangun pada 2019.

Selain pergudangan modern, Logos juga akan membangun kompleks logistik modern di area seluas 23 hektare di Kota Deltamas, Cikarang.

James juga menyampaikan yield yang didapat dari pasar kawasan industri pada kuartal III/2018 berjumlah 8,0% hingga 8,5%, sedangkan pertumbuhan harga tanah di kawasan industri area Jabodetabek masih cenderung stabil.

PROSES LAMA

Direktur Utama PT Modern Industrial Estate Pascal Wilson mengaku penjualan lahan industri saat ini memang masih tersendat dan belum menunjukkan pertumbuhan yang baik.

"Karena *kan* di industri beda ya untuk menangani satu konsumen saja membutuhkan waktu yang banyak, tidak seperti produk komersial. Prosesnya lama karena juga terkait nilai investasi perusahaan yang membeli, sehingga butuh waktu panjang. Apalagi melihat nilai dolar sekarang tinggi, kedua regulasi dan tahun politik pasti ekonomi juga sedikit terganggu," ujar Pascal usai seremoni *groundbreaking* Modern Halal Valley di Serang, Rabu (10/10).

Dia mengatakan telah mengantongi permintaan lahan industri 90 hektare pada Modern Halal Valley dan sebanyak 30 hektare pada Modern Cikande Industrial Estate yang sedang diusahakan untuk dapat terealisasi pada tahun ini.

Perusahaannya tidak akan merubah target penjualan hingga akhir tahun dan masih akan terus berusaha untuk mencapai nilai target penjualan yang mencapai Rp1 triliun.

Menurutnya, PT Modernland Realty Tbk. melalui anak perusahaannya PT Modern Industrial Estate meluncurkan klaster khusus industri halal, Modern Halal Valley yang merupakan kawasan klaster industri halal terinteregasi pertama seluas 500 hektare yang berlokasi di Modern Cikande Industrial Estate.

"Modern Cikande Industrial Estate ingin berpartisipasi dalam mewujudkan visi Indonesia untuk membangun ekosistem halal yang lengkap untuk makanan halal dan industri terkait," ujar Pascal.

Modern Halal Valley akan terdiri atas tiga tahapan pengembangan dengan tahap pertama mengembangkan lahan seluas 150 hektare dan total investasi mencapai Rp500 miliar di luar harga lahan.

Pengembangan tahap pertama akan memfokuskan kepada tiga sektor industri seperti industri makan dan minuman (mamin), industri obat-obatan, dan industri kosmetik yang terdiri atas industri lokal hingga asing.

Head Officer Investor Relation Bekasi Fajar Industrial Estate, Seri, juga optimistis perusahannya mencapai target meski kondisi sektor kawasan industri masih tersendat. "Kami masih mau mencapai target kok, kami belum merubah target," ujarnya kepada *Bisnis*.

Perusahaan dengan kode saham BEST tersebut menargetkan akan menjual lahan industri seluas 35 hektare hingga 45 hektare sampai dengan akhir 2018.

Direktur PT Griya Idola Eddy Kalrli mengatakan di kawasan Industri Griya Idola Industrial Park (GIIP) yang merupakan anak perusahaan PT Barito Pasific Tbk di Cikupa, Tangerang akan dibangun pabrik, gudang (menengah, kecil dan multiguna), ritel, ruko, perkantoran, dan hotel. Selain itu juga akan dibangun pabrik eksklusif, gudang dengan kualitas tinggi, *food pavilion*, dan *data center* jika bisa dialokasikan.

Eddy menilai pengembangan kawasan industri di Cikupa, Tangerang, bagian barat luar Jakarta sangat berpotensi karena selama ini pembangunan kawasan industri terfokus di bagian Timur luar Jakarta. Sejumlah besar bisnis manufaktur, logistik, dan pergudangan mengisi kawasan industri di area seperti Karawang, Bekasi, dan Cikarang.

"Kami banyak menerima permintaan untuk lahan industri dan tingkat serapan di kawasan ini berada di angka 80%, jadi kami melihat ada potensi yang besar," Lanjut Eddy.

Eddy memaparkan pembangunan GIIP terbagi menjadi beberapa fase. Pada fase I, perusahaan penghasil produk sanitasi ROCA dari Spanyol sudah membangun pabrik pertama pada 7 hektare lahan dan segera beroperasi. Sementara itu, perusahaan lainnya yang ikut bergabung di antaranya dari sektor logistik, manufaktur atau perakitan dari berbagai industri termasuk otomotif, kesehatan, F&B dan *consumer goods*.

LAHAN INDUSTRI STAGNAN

Penjualan lahan industri saat ini memang masih tersendat dan belum menunjukkan progres yang baik. Ada kenaikan permintaan lahan, khususnya dari industri logistik, otomotif, dan perusahaan *fast moving consumer goods* (FMCG). Namun, hal itu belum mampu menopang angka penjualan lahan industri, karena mereka masih belum melakukan keputusan pembelian.

Penyerapan Lahan Industri

Lokasi	Rasio Penyerapan Lahan	Rata-rata Harga Lahan (Rp/m²)
Bekasi	90,95%	2.900.000
Bogor	84,95%	2.500.000
Cilegon	96,44%	2.400.000
Jakarta	99,64%	5.700.000
Karawang & Purwakarta	66,38%	2.609.827
Serang	80,00%	2.000.000
Tangerang	84,66%	2.566.667
Rata-rata	85,14%	2.760.000

Sumber: Leads Property Services Indonesia